

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dewasa ini, pendidikan yang bermutu merupakan indikator kemajuan suatu negara, hal ini disebabkan oleh mutu lulusan serta pemerataan pendidikan yang menjadi tonggak keberhasilan pemerintah di negara tersebut. Salah satu masalah pendidikan yang kita hadapi adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru dan kepala sekolah, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertulis bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Salah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1, h.2

satunya dengan kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut menyiratkan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, pemerataan wilayah daerah serta memberikan kesempatan kepada tiap-tiap daerah untuk mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Penerapan otonomi daerah membawa konsekuensi adanya restrukturisasi kelembagaan pemerintah, termasuk di bidang pendidikan. Pelimpahan wewenang yang terjadi akibat pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang pendidikan membuat sekolah memiliki otoritas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikannya yang melibatkan pengambilan keputusan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Dalam hal ini, manajemen sekolah menjadi faktor penting dalam pembentukan mutu yang dihasilkan dari suatu sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah hadir dengan tujuan memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan pendidikan agar dapat melakukan peningkatan mutu seluas-luasnya.

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1, h. 2

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi, “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah”.<sup>3</sup> Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan MBS yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.

Manajemen Berbasis Sekolah merupakan suatu alternatif dari pola pengelolaan sekolah dengan kewenangan yang besar diletakkan pada tingkat lokal/sekolah.<sup>4</sup> Pengelolaan sekolah dalam rangka desentralisasi pendidikan ditandai dengan adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. MBS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. MBS dapat terwujud dengan berbagai faktor yang mendukungnya antara lain kepemimpinan kepala sekolah, tinggi rendahnya partisipasi masyarakat, kompetensi guru maupun pegawai, lingkungan sekolah, kompetensi peserta didik, fasilitas penunjang pembelajaran dan lain-lain.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51, h. 14

<sup>4</sup> Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h.18

MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang menekankan pada partisipasi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pembelajaran di sekolah. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan diperlukan sosialisasi secara terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak sekolah.

Berdasarkan kunjungan dan hasil *grandtour* yang dilakukan peneliti pada 8 Maret 2016 dan 23 Maret 2016 di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi, peneliti menemukan beberapa hal terkait mengenai Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi. Sekolah tersebut merupakan sekolah swasta yang memiliki karakteristik MBS antara lain memiliki lingkungan sekolah yang aman dan tertib, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan target mutu yang hendak dicapai, adanya pengembangan staf dan guru secara terus menerus, adanya evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, memiliki kemitraan yang kuat serta adanya partisipasi aktif komite terhadap pengelolaan sekolah.

Visi SMP Muhammadiyah 28 Bekasi yaitu berprestasi berlandaskan IMTAQ, unggul dalam keilmuan, nyata dalam kualitas. Misi SMP Muhammadiyah 28 Bekasi yaitu: (1) melaksanakan pembelajaran dan

bimbingan secara efektif, agar siswa berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya, (2) menumbuhkan semangat berprestasi secara intensif kepada seluruh warga sekolah, (3) menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama dalam berlaku dan bertindak, (4) menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan warga sekolah dan *stakeholders* terkait. Ditetapkannya visi dan misi tersebut membuat SMP Muhammadiyah 28 Bekasi selalu merancang program-program yang dapat mewujudkan MBS.<sup>5</sup>

SMP Muhammadiyah 28 Bekasi mendapatkan bantuan pengelolaan sekolah dari pemerintah Australia. Bantuan ini bernama *Professional Development for Education Personnel* (ProDEP). ProDEP adalah program pengembangan keprofesian tenaga kependidikan yang bertujuan untuk membantu pemerintah Indonesia mengembangkan sebuah sistem nasional pengembangan keprofesian tenaga kependidikan. Sistem nasional pengembangan keprofesian tersebut dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja kepala sekolah/madrasah, pengawas, dan pejabat pendidikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang bertanggung jawab atas manajemen dan tata kelola sekolah/madrasah. Secara umum ProDEP bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu kepemimpinan dan

---

<sup>5</sup> Hasil Studi Dokumentasi, pada tanggal 23 Maret 2016

pengelolaan sekolah dan madrasah. Program ini telah berlangsung dari tahun 2013 dan akan berakhir di tahun 2016. Adanya ProDEP diharapkan mampu menjadi sarana peningkatan mutu kepemimpinan kepala SMP Muhammadiyah 28 Bekasi agar kepala sekolah dapat menjadi pemimpin yang aktif, kreatif serta inovatif.<sup>6</sup>

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah terdapat program-program sekolah yang membutuhkan penanganan kepemimpinan yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Kepemimpinan yang kuat merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah melalui program-program yang terencana dan bertahap. Begitu juga yang terjadi di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi, kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh penting dalam mewujudkan MBS. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah yang sangat berpengaruh dan menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen yang tinggi dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan, tentunya kepala sekolah memerlukan bantuan dari seluruh warga sekolah sehingga dapat terbentuk suatu *teamwork* yang baik yang membuat MBS dapat tercapai.

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan pihak Majlis Dikdasmen Muhammadiyah Bekasi, pada tanggal 23 Maret 2016

Kepala sekolah merupakan motor penggerak suatu sekolah agar semua warga sekolah dapat terlibat dan berpartisipasi aktif sesuai tugas dan fungsinya terhadap proses pengelolaan sekolah. Mengacu kepada standar-standar yang telah ditetapkan pemerintah, kepala sekolah harus diberi wewenang untuk mengatur secara kreatif dan inovatif sesuai potensi dan kebutuhan sekolah. Dengan kemitraan yang banyak dibangun oleh kepala SMP Muhammadiyah 28 Bekasi menjadikan sekolah ini dapat menerapkan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sehingga mutu sekolah dapat ditingkatkan secara terus menerus.

Berdasarkan latar belakang yang muncul di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi”**.

#### **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan sub fokus penelitian yaitu peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, peran kepala sekolah dalam melakukan pengarahan, peran kepala sekolah dalam memberikan motivasi serta peran kepala sekolah dalam memberikan teladan.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi?
2. Bagaimana peran kepala sekolah dalam melakukan pengarahan di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi?
3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memberikan motivasi di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi?
4. Bagaimana peran kepala sekolah dalam memberikan teladan di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi?

### **D. Tujuan Umum Penelitian**

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris serta menganalisis kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Muhammadiyah 28 Bekasi.

### **E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan rujukan untuk mengetahui kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan efektif dan efisien.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, untuk menambah ilmu mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah.
- b. Bagi SMP Muhammadiyah 28 Bekasi, sebagai informasi terhadap pentingnya kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sehingga menjadi acuan dalam mencapai tujuan sekolah.
- c. Bagi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai Manajemen Berbasis Sekolah.